

KONSEPSI MARITIM DALAM BINGKAI GEOPOLITIK INDONESIA

Si Putu Ardana*)

Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak lupa akan sejarahnya. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat menggali pengalaman-pengalaman masa lampau, untuk masa kini, dan masa depan. Kesenambungan belajar dari pengalaman inilah yang dapat menciptakan kemajuan bagi suatu bangsa. Kebesaran sejarah masa lalu akan membangkitkan kebanggaan dan rasa kecintaan yang besar terhadap bangsanya, sekaligus memotivasi untuk meraih kejayaan masa kini. Lagu "Nenek Moyangku Orang Pelaut", menggelitik perasaan kita bersama dengan pertanyaan di hati, kita para "cucu-cucu" pewaris wilayah Nusantara ini, jugakah pewaris semangat dan jiwa bahari para leluhur kita?

Sejarah masa lalu membuktikan bahwa bangsa Indonesia pada jaman dahulu adalah bangsa bahari. Peninggalan sejarah bangsa asli di Australia dan Madagaskar, menunjukkan bahwa ratusan bahkan mungkin ribuan tahun Sebelum Masehi, nenek moyang kita sudah menjalin hubungan dengan kedua bangsa tersebut. Pengaruh bahasa-bahasa Austronesia terasa cukup kuat terhadap bahasa-bahasa yang digunakan di Indonesia, dibandingkan dengan bahasa Indochina.

Ruang hidup di wilayah ke-

pulauan dengan tantangan alam yang sangat berat, membentuk watak dan karakter spesifik sebagai bangsa bahari, yang bercirikan rajin, pemberani, semangat pantang menyerah, dan daya tahan yang tinggi, serta agamis. Kesadaran ruang, melahirkan konsep geopolitik dan geostrategi bangsa, yang pada gilirannya berhasil menghantarkan bangsa Indonesia mencapai masa-masa kejayaan sebagai bangsa bahari selama ratusan tahun di bawah kerajaan Sriwijaya (683 - 1030 Masehi), dan Majapahit (1293 - 1478 Masehi). Sejarah telah membuktikan bagaimana Kera-

*) Laksdya TNI Si Putu Ardana, Wakil Gubernur Lemhannas RI

jaan Sriwijaya mengendalikan urat nadi perniagaan sepanjang Selat Malaka, yang akhirnya memaksa Armada China di bawah pimpinan Cheng-Ho datang ke Palembang. Demikian pula kehadiran Armada China di pantai Utara Jawa Timur sebagai respons atas kegiatan Armada Majapahit. Walaupun sebagian ahli sejarah berpandangan negatif tentang Sriwijaya dan Majapahit yang dianggap sebagai kerajaan-kerajaan ekspansionis, namun bangsa-bangsa mana pun di belahan bumi pada masa itu, berupaya untuk memperluas "*strategic space*" dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupannya.

Memasuki pertengahan abad ke-18, eksistensi bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari semakin pudar, karena akses ke laut sepenuhnya dikuasai oleh Belanda. Penguasaan atas laut, yang mengandung arti penggunaan dan pemanfaatan wilayah laut, sepenuhnya diarahkan untuk menunjang kepentingan Belanda dan sekutu-sekutunya, sehingga tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain, termasuk masyarakat pribumi untuk ikut memanfaatkannya. Padahal akses ke laut kemudahan-kemudahan dalam memanfaatkan wilayah laut berikut kandungan sumberdaya

alamnya bagi suatu bangsa yang hidup di lingkungan laut adalah sangat vital bagi kelangsungan hidup bangsa tersebut (Mark J. Valencia, 1985).

Titik balik ini terjadi setelah ditandatanganinya perjanjian Gianti pada tahun 1755 untuk mengakhiri perang saudara di Mataram. Akibatnya, bukan saja kerajaan Mataram terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kasunanan Surakarta Hadiningrat, namun yang lebih vital dan bernilai strategis lagi adalah penguasaan laut diserahkan kepada pihak Belanda. Selama menjajah Indonesia, Belanda dengan armada lautnya (Armada Angkatan Laut dan Armada Niaga) berhasil menguasai seluruh akses ke laut di perairan Indonesia (Hindia Belanda), sehingga masyarakat kita yang hidup di daerah-daerah pesisir dan pulau-pulau makin terdesak kepedalaman yang hidup dari pertanian. Di samping itu, para tokoh masyarakat dan rakyat beserta keluarganya yang menentang penjajah terpaksa bersembunyi di daerah-daerah pedalaman sebagai petani, karena dikejar-kejar Belanda.

Fenomena kehidupan seperti ini berlangsung selama ratusan tahun dan akhirnya membentuk kultur baru sebagai masyarakat agraris, bervisi kontinental di

gugusan kepulauan terbesar di dunia ini. Laut tidak lagi dipandang sebagai "*serambi depan*" yang penuh harapan, namun dijadikan "*serambi belakang*". Hal tersebut dapat kita lihat pada hampir seluruh masyarakat pantai yang membangun rumahnya membelakangi laut. Visi mereka telah berubah, harapan mereka ditumpangkan ke daratan. Mengubah kebiasaan tersebut tidaklah mudah. Namun demikian sebagian masyarakat masih ada yang tetap menggantungkan hidupnya dari laut, antara lain masyarakat di pantai Barat, Utara, dan Timur Aceh, Sumatera Timur, Riau Kepulauan, pantai Utara Jawa, serta suku Madura, Bugis, Makassar, Bajo dan sebagian masyarakat Maluku, yang pada umumnya mereka hidup sebagai nelayan dan pedagang.

Sejak menegara pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai saat ini, ciri-ciri sebagai bangsa bahari semakin samar-samar. Bangsa Indonesia lebih terobsesi oleh visi kontinental yang mewarnai segenap aspek kehidupan bangsa. Walaupun Wawasan Nusantara sebagai konsepsi geopolitik Indonesia, (yang dideklarasikan sejak tanggal 13 Desember 1957 melalui Deklarasi Juanda, dan baru mendapatkan pengakuan internasional 25 tahun kemudian, melalui UNCLOS 1982), telah

dijadikan landasan visioner pembangunan bangsa sejak tiga dasawarsa yang lalu, namun dalam implementasi dan operasionalnya belum mencerminkan asas-asas dan prinsip-prinsip Wawasan Nusantara. Akibat warisan sejarah penjajahan masa lalu, bangsa kita sebagian besar masih enggan dan "tidak" melihat realitas bahwa wilayah geografi yang menjadi ruang hidupnya, dua pertiga bagian adalah terdiri dari laut dan perairan.

Apabila kita simak dan teliti kembali berbagai kebijaksanaan pembangunan nasional yang pernah dirumuskan di masa lalu, secara obyektif akan tampak jelas bahwa kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut lebih banyak bertumpu pada potensi wilayah daratan, di mana pembangunan infra struktur di wilayah daratan jauh lebih besar dibandingkan infra struktur di wilayah pesisir dan lautan.

Kesemuanya itu menunjukkan bahwa bangsa kita masih belum memiliki kesadaran ruang yang tinggi, padahal kesadaran ruang hidup ini akan menentukan eksistensi bangsa Indonesia, karena kesadaran ruang akan menjiwai konsep geopolitik, yang memberi warna dominan bagi kebijaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka mempertahankan kelangsungan

hidup dan mengembangkan kehidupannya.

Kesadaran ruang yang dimaksud akan menumbuhkan keinginan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk mau dan mampu melihat, menyadari, memahami, kemudian memanfaatkan sebaik-baiknya ruang hidup, yaitu geografi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan dua pertiga wilayahnya terdiri dari laut beserta kandungan sumberdaya alamnya yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil dan merata.

Gambaran Potensi Konflik Laten

Apabila posisi Indonesia dicermati akan tergambar dengan jelas bahwa dalam interaksinya dengan bangsa-bangsa lain, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik mengandung 4 (empat) faktor konflik potensial yang bersifat laten. Potensi konflik ini apabila tidak diantisipasi dan dikendalikan maka setiap saat dapat mengancam kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia.

Keempat potensi konflik dimaksud adalah sebagai berikut.

Pertama, potensi konflik laten karena belum terselesaikannya perjanjian perbatasan wilayah

laut. Sebagaimana diketahui, bagian terbesar perbatasan kita dengan negara-negara tetangga terletak di laut dan sebagian besar masih bermasalah. Letak beberapa perbatasan laut yang menjadi sumber konflik potensial dengan negara-negara tetangga, adalah di Laut Natuna dengan Vietnam, di Laut Sulawesi (Marore-Miargas) dengan Philipina, di perairan Utara Papua dengan Republik Palau, di Selat Makasar/perairan Kalimantan Timur yaitu pulau Sipadan, dan Ligitan dengan Malaysia, di perairan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Lorosae dan Australia (*Ashmore Island*).

Kedua, potensi konflik laten, karena posisi Indonesia terbuka dan terletak di persimpangan jalan dunia. Posisi tersebut memiliki nilai strategis namun juga sekaligus mengandung kerawanan karena letak atau posisi yang terbuka mudah mengundang ancaman dari luar terhadap wilayah kedaulatan nasional yang dapat datang setiap saat dari berbagai arah.

Ketiga, potensi konflik laten, karena perairan nasional dijadikan jalur pendekat strategis. Karena letaknya di antara dua samudera, yaitu samudera Hindia dan samudera Pasifik maka perairan Indonesia digunakan sebagai jalur pendekat strategis, baik untuk kepentingan ekonomi

maupun militer oleh negara-negara besar di dua kawasan yaitu samudera Hindia dan samudera Pasifik, serta benua Asia dan Australia. Dalam hal ini pemerintah telah menetapkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sesuai kewajiban negara pantai dan telah memperoleh pengakuan internasional pada sidang *International Maritime Organization* (IMO) tanggal 19 Mei 1998. Hal ini mengakibatkan perairan nasional sangat rawan bagi timbulnya berbagai bentuk ancaman terhadap kepentingan nasional. Apabila Indonesia tidak mampu memberikan jaminan keamanan di jalur-jalur pelayaran internasional tersebut maka akan mudah mengundang campur tangan pihak asing untuk mengamankan jalur perekonomiannya.

Keempat, di era globalisasi yang berkembang, muncul *trend* baru di mana negara-negara besar berupaya memperluas "*strategic space*" ke Asia Tenggara, untuk menjamin kepentingan nasionalnya, khususnya penguasaan akses ekonomi yang berupa bahan baku industri dan pasar serta pengaruh politik dalam kerangka strategi global. Dalam konteks ini, Indonesia tampaknya dijadikan "target utama" di Asia Tenggara karena beberapa alasan, antara lain karena letaknya yang sangat

strategis, menjadikan Indonesia sangat efektif untuk digunakan sebagai pusat pengendalian kawasan Asia Tenggara dalam rangka membendung pengaruh Cina. Di samping itu, dengan kandungan sumber daya alamnya yang cukup potensial seperti di Aceh, Riau, Kalimantan Timur dan Papua serta letaknya yang strategis itu merupakan akses pasar yang baik, menjadikan Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai lahan yang sangat prospektif untuk menunjang kepentingan ekonomi negara-negara besar. Hal ini dapat dilihat dari peta situasi yang berkembang, di mana konflik-konflik internal seperti gerakan separatist, keinginan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan RI, dan konflik-konflik bersenjata antar-etnis, sebagian besar berada di sekitar jalur-jalur pelayaran internasional, antara lain Aceh, Riau, Kalimantan Barat dan Timur, Poso, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua, serta Timor Lorosae yang berhasil memisahkan diri dari Negara Kesatuan RI (DR. Hasyim Jalal, 2002).

Potensi Kelautan Nasional

Wilayah nasional Indonesia terbentang sangat luas atau hampir sama dengan jarak dari pantai Barat Inggris hingga perbatasan Eropa - Asia. Sebagian

besar wilayah yang sangat luas ini ($\pm 5,8$ juta km^2) merupakan kawasan laut dengan ± 17.506 buah pulau besar dan kecil dengan garis pantai sepanjang ± 81.000 kilometer. Letaknya di daerah khatulistiwa yang beriklim tropis, menjadikan wilayah pesisir dan laut yurisdiksi nasional memiliki daya dukung alami yang sangat potensial bagi pengembangbiakan biota laut. Oleh sebab itulah Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) laut terbesar di dunia karena memiliki ekosistem pesisir dan laut yang khas seperti hutan mangrove, terumbu karang (*coral reefs*), padang lamun (*sea grass beds*), serta potensi lestari sumber daya perikanan laut.

Berlakunya UNCLOS 1982 sebagai hukum positif sejak tanggal 16 Nopember 1994 memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia untuk mengelola potensi sumberdaya kelautan, karena Indonesia sebagai negara pantai di samping memiliki kedaulatan penuh terhadap laut teritorial dan perairan Nusantara, serta memiliki hak-hak berdaulat dan yurisdiksi terhadap ZEEI berikut landas kontinen, juga mempunyai hak untuk ikut mengelola kawasan laut bebas di Samudera Hindia. Wilayah Laut dan perairan yurisdiksi nasional tersebut me-

iliki potensi ekonomi lainnya baik berupa perikanan dan mineral, maupun minyak dan gas bumi, serta benda-benda berharga dari dasar laut.

Potensi Perikanan laut. Wilayah laut teritorial Indonesia memiliki potensi perikanan laut yang sangat besar. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati laut tertinggi (*mega diversity*) di dunia. Berbagai jenis ikan bernilai ekonomis, seperti udang, tuna, cakalang, kakap, baronang, tengiri, bawal, ikan hias, rajungan, kepiting, cumi-cumi, kerang-kerangan (termasuk kerang mutiara) dan rumput laut tersebar hampir di seluruh laut Indonesia. Potensi lestari sumberdaya ikan laut yang dapat ditangkap sekitar 6,2 juta ton/tahun, yang terdiri dari potensi perairan Nusantara 4,4 juta ton/tahun dan ZEEI sebesar 1,8 juta ton/tahun. Potensi sumber daya ikan laut tersebut baru dimanfaatkan sebesar 45%. Potensi ikan laut yang dimaksud meliputi 60 % ikan pelagis, 25 % ikan demersal, 7% tuna dan cakalang, 2,5% cumi-cumi, 1,5% udang dan 4% jenis-jenis ikan lainnya. Dilihat dari sisi kemampuan pengadaan dapat dijelaskan bahwa dari 14 *fishing ground* perikanan dunia ternyata 9 di antaranya telah *overfishing* sedangkan 5 *fishing*

ground masih dapat dikembangkan di mana perairan Indonesia termasuk di dalamnya.

Meskipun potensi penangkapan ikan laut masih cukup besar, namun usaha pengembangannya perlu dilakukan secara berhati-hati, karena beberapa daerah perairan sudah mengalami kondisi tangkap lebih (*overfishing*) atau kritis. Daerah-daerah kritis tersebut, antara lain adalah Selat Malaka, Pantai Utara Jawa, Selat Bali, Selat Makasar (khusus ikan pelagis kecil dan ikan terbang), Selat Malaka, Pantai Utara Jawa, Cilacap, pantai Barat Sumatera Utara, pantai Barat/Selatan, Timur Kalimantan, Sulawesi Selatan dan Paparan Sahul Papua (udang), Selat Malaka dan pantai Utara Jawa (ikan Demersal) dan Selat Alas (cumi-cumi). Adapun daerah-daerah yang potensial masih dapat dikembangkan adalah Perairan Barat Sumatera, Laut Cina Selatan, Utara Sulawesi, Maluku-Papua, Selatan/Timur Kalimantan, NTB dan NTT (ikan Pelagis kecil), Laut Cina Selatan, Selat Makasar, Selat Kalimantan, lepas pantai Laut Jawa serta Maluku-Papua (ikan Demersal), Perairan Utara Sumatera, Laut Cina Selatan, NTB, NTT dan Maluku-Papua (ikan Karang), Perairan Utara Sumatera (Aceh), Barat Sumatera, Utara Sulawesi, NTB, NTT termasuk Maluku-Papua

(ikan Tuna dan Cakalang).

Khusus mengenai perikanan laut ini maka yang perlu diwaspadai adalah tentang pengaruh Organisasi Perikanan Internasional (*Regional Fishery Management Organizations/RFMO*) yang dengan dalih konservasi telah membatasi kesempatan Indonesia untuk turut memanfaatkan jenis-jenis ikan bermigrasi jauh (*highly migratory species*). Ketidakikutannya Indonesia dalam RFMO dengan ketiadaan dana seyogyanya dikaji kembali oleh pemerintah, khususnya Departemen Keuangan, mengingat manfaat yang akan diperoleh jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya keanggotaan yang harus dibayar.

Sekalipun kekayaan perikanan demikian besar namun kita cukup prihatin karena belum mampu memanfaatkannya secara optimal. Di satu sisi teknologi penangkapan kita sangat sederhana dengan kapal-kapal tradisional pula. Hanya sekitar 17% dari total armada perikanan nasional yang dikategorikan sebagai nelayan modern. Para nelayan kita masih akrab dan hidup dengan kemiskinan. Hal tersebut dapat ditemukan pada desa-desa di sebagian besar desa-desa pantai. Di sisi lain, ratusan bahkan mungkin ribuan kapal-kapal ikan asing menyerbu dan menangkap ikan di laut

Nusantara. Ironisnya kapal-kapal tersebut berbendera Indonesia, sedangkan awaknya orang asing dengan ijin resmi untuk menangkap ikan. Kerugian negara akibat praktek tersebut diperkirakan mencapai US \$ 1,9 miliar per tahun. Kondisi ini mengundang protes dari para nelayan dan mendesak agar kegiatan tersebut dihentikan. Di samping itu kerusakan lingkungan ekosistem laut dari hari ke hari semakin memprihatinkan akibat ulah para nelayan yang menangkap ikan dengan bahan kimia atau pengeboman. Hal ini didorong oleh kebutuhan ekonomi yang dimanfaatkan oleh tauke-tauke asing.

Potensi lahan pertambakan (budidaya air payau) seluas \pm 840.000 Ha sampai saat ini baru diusahakan sekitar \pm 300.000 Ha. Sementara itu, dengan kondisi perairan pesisir yang hangat dan relatif tenang, terutama di daerah-daerah teluk, merupakan areal yang sangat potensial bagi pengembangan usaha budidaya laut (*marine culture*), seperti budidaya jenis-jenis ikan karang, mutiara, kerang-kerangan dan rumput laut. Usaha budidaya laut menjanjikan prospek yang cerah, karena dalam dasawarsa terakhir permintaan terhadap jenis-jenis ikan kerapu, baronang, napoleon, kakap dan rumput laut, untuk pasar dalam

negeri maupun ekspor terus meningkat. Sampai saat ini, tingkat pengusahaan budidaya laut masih sangat rendah.

Potensi Pertambangan dan Energi. Pendayagunaan sumber daya energi yang berada di laut baru berupa penambangan minyak dan gas alam, serta penambangan mineral berupa timah. Saat ini produksi minyak bumi yang berasal dari sumur lepas pantai mencapai sekitar 35 % dari seluruh produksi nasional, sedangkan gas alam telah ditambang di perairan pantai utara Jawa Barat, Arun/Aceh, Bontang/Kalimantan Timur, sekitar Madura, dan Laut Utara pulau Bali/Lombok. Sumber gas alam di kepulauan Natuna dan Utara Papua yang sangat besar, serta sumber Migas di Sulawesi Selatan diharapkan segera dapat dieksploitasi. Peranan minyak dan gas alam sebagai sumber devisa penting tetap diharapkan, meskipun ada kekhawatiran terhadap peningkatan pemakaian bahan bakar dalam negeri, yang memungkinkan Indonesia menjadi importir minyak bumi terbesar pada tahun 2005. Oleh karena itu, intensifikasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi ladang-ladang minyak, penambangan sumber minyak kedua dan ketiga (*secondary dan tertiary recoveries*), serta penguasaan teknologi penambangan di laut lebih

dari 200 meter perlu segera ditingkatkan.

Dari data geologi kelautan, diketahui bahwa di Indonesia terdapat cekungan yang potensial mengandung minyak dan gas bumi. Dari 60 cekungan minyak bumi dan gas yang ditemukan, sebanyak 70 % berada di laut. Dari jumlah cekungan-cekungan tersebut diperkirakan akan dihasilkan 106,2 milyar barrel, namun baru 16,7 milyar barrel yang diketahui dengan pasti, dan 7,5 milyar barrel di antaranya telah dieksploitasi. Cadangan minyak yang belum terjamah diperkirakan sebesar 89,5 milyar barrel, di mana 57,3 milyar barrel terkandung di lepas pantai.

Dalam hubungan ini kandungan minyak bumi dan gas yang telah ditemukan di lepas pantai Indonesia (*offshore resources*) sebesar antara 10 - 100 miliar barrel berada pada area seluas 2.777.000 Km. Di samping itu, ditemukan pula gas sebesar 1 - 10 *trillion feet* di perairan Natuna, dan minyak bumi sebesar 10 - 100 miliar barrel di laut Arafuru. Di wilayah Sorong dan perairan Papua telah ditemukan pula cekungan yang mengandung minyak bumi dalam jumlah yang sangat besar. Penemuan-penemuan baru masih terbuka di kelak kemudian hari (Data CSIS, Jakarta, 1999).

Selain itu, ditinjau dari segi geologi daerah-daerah di sekitar pulau dan daratan banyak pula ditemukan zone mineralisasi yang kaya akan endapan mineral seperti zona mineralisasi laut agak dalam ditemukan di sekeliling Papua, Ambon dan Seram, Sulawesi, Halmahera dan Selat Makasar, sepanjang lepas pantai sebelah Barat Sumatera dan sebelah Selatan Jawa, sedangkan di sekeliling laut dangkal ditemukan pula zona mineralisasi di sekitar Selatan dan Barat Kalimantan, di sebelah Timur Sumatera, di sekitar kepulauan Riau, Bangka dan Belitung.

Hal yang menonjol saat ini adalah usaha penambangan pasir laut di sekitar kepulauan Riau yang diekspor ke Singapura. Kegiatan tersebut pada dasarnya telah berlangsung cukup lama lebih kurang 8 - 10 tahun lalu dengan harga berkisar SIN \$ 16,00/ton. Pada empat lima tahun terakhir ini kegiatan tersebut semakin meningkat dan harga jual semakin rendah hingga mencapai sekitar SIN \$ 1,25 - 1,35/ton. Mengingat komoditi tersebut berpeluang meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat, maka usaha penambangan pasir tersebut perlu diatur sedemikian rupa sehingga menjamin sebesar-besarnya pemasukan bagi negara, namun tetap memperhatikan dampak

lingkungan yang secara langsung berpengaruh kepada produktivitas nelayan sekitarnya.

Potensi Benda-benda Berharga. Benda-benda berharga dasar laut yang berhasil dihimpun berada di \pm 450 lokasi yang tersebar di kawasan perairan Sabang, Selat Malaka, perairan Riau Kepulauan, perairan Bangka-Belitung, Selat Karimata, Laut Jawa, Laut Flores serta pada jalur pelayaran antara Sulsel-NTT, serta perairan Halmahera dan Maluku.

Pemanfaatan benda-benda berharga tersebut belum tertangani secara optimal. Kita tidak lupa kejadian beberapa tahun lalu ketika barang-barang berharga dasar laut di sekitar Karang Heliputan (sebelah Timur Pulau Bintan) dilelang di Eropah, dan pada tahun 2001 yang lalu barang-barang serupa dari sekitar Selat Bangka dilelang di Jerman. Banyak faktor yang memerlukan perhatian kita, mulai dari kewenangan perijinan yang telah dilimpahkan kepada Departemen Kelautan, mekanisme perijinan dikaitkan dengan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai Otonomi Daerah, dukungan permodalan yang cukup besar dan teknologi pengangkatan benda-benda berharga dari dasar laut. Sebagian besar dari kita masih awam dalam cara pengangkatan benda-benda ter-

sebut sehingga mengakibatkan banyak benda-benda berharga yang berhasil diselami dan diangkat oleh para nelayan kita namun setelah tiba di permukaan menjadi hancur berantakan dan akhirnya tidak memiliki nilai ekonomis lagi. Banyaknya titik-titik yang diperkirakan sebagai tempat/lokasi barang-barang berharga dasar laut, apabila dikelola secara profesional, diharapkan dapat memiliki nilai ekonomis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Potensi Wisata Bahari. Obyek dan daya tarik pariwisata bahari Indonesia sangat lengkap, mulai dari fenomena alam yang dimilikinya, budaya dan kehidupan sosial masyarakat penghuninya, biota laut dan habitatnya serta kualitas perairannya. Beberapa contoh wisata bahari Indonesia yang cukup langka di belahan bumi mana pun, antara lain adalah Gelombang Samudera di pantai Grajakan Jawa Timur mempunyai daya tarik bagi para penggemar selancar (*surfing*) karena memiliki keistimewaan yang tidak banyak terdapat di tempat lain; Terumbu karang di Padaido Biak-Papua adalah terumbu karang yang memiliki rating yang sangat tinggi; berbagai jenis Billfish di kawasan laut lepas Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua adalah daya tarik

yang sangat diminati para wisatawan pemancing (*game fishermen*); penyu hijau yang konon sudah hampir punah dari muka bumi namun ternyata masih cukup banyak terdapat di berbagai tempat di Indonesia adalah daya tarik bagi para wisatawan pecinta lingkungan; area penyelaman seperti Bunaken di Sulawesi Utara, Kepulauan Derawan di Kalimantan Timur, Pulau Lemongan di Bali, Pulau Banda, Pulau Biak dan sekitarnya. Beberapa tempat yang sudah dikenal oleh para wisatawan mancanegara (*wisman*) telah mulai dikelola secara efektif, namun masih cukup banyak potensi wisata bahari yang belum dikemas sedemikian rupa untuk dijual, baik bagi pengunjung domestik maupun *Wisman*. Di masa depan, potensi tersebut memerlukan perhatian serius dengan konsep pengelolaan yang profesional.

Potensi Industri Maritim. Kemampuan industri maritim di Indonesia telah dibuktikan oleh beberapa galangan kapal nasional. Dari segi penguasaan teknologi pembuatan kapal dan kemampuan sumber daya manusia sudah mencapai taraf yang memadai, sekalipun sesungguhnya masih jauh tertinggal dari negara-negara maju. Sejak awal tahun 1980-an telah ratusan kapal berhasil dibangun oleh galangan kapal nasional dari ber-

bagai jenis antara lain kapal-kapal niaga, kapal-kapal khusus, kapal-kapal ikan dan kapal-kapal patroli.

Sangat disayangkan bahwa sejak krisis multidimensional melanda negara kita, kegiatan tersebut seperti terhenti. Oleh karena investasi terhenti, akibatnya adalah lapangan kerja secara bertahap terhapus. Kegiatan yang masih berjalan, sekalipun "merangkak", adalah pembangunan kapal-kapal penangkap ikan dan kapal-kapal barang tradisional di Sumatera, Madura dan Sulawesi Selatan.

Potensi Perhubungan Laut. Transportasi laut memiliki potensi yang cukup besar bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi bangsa, karena kondisi negara kita yang penduduknya tersebar mendiami berbagai pulau itu dipersatukan oleh laut yang sangat luas. Potensi transportasi laut, termasuk penyediaan lapangan kerja yang profesional, diharapkan dapat berperan sebagai penyumbang pendapatan nasional (*gross domestic product*) dan sekaligus sebagai infrastruktur terhadap pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya, sehingga dapat sebagai sumber devisa negara. Sebagai konsekuensi dari kedudukan itu maka perhubungan laut kita memiliki tiga komponen utama yaitu sistem angkutan laut, ke pelabuhanan,

dan keselamatan pelayaran. Ketiga komponen ini memiliki potensi yang apabila ditingkatkan dan dikembangkan akan menciptakan serta lebih memperluas lapangan kerja, memperdalam alih teknologi, menghasilkan devisa dan menghemat pengeluaran devisa negara serta terjaminnya produksi dan distribusi nasional.

Panjangnya garis pantai dengan pertumbuhan ekonomi daerah propinsi dan kabupaten yang memiliki garis singgung dengan laut, merupakan potensi bagi perkembangan pelabuhan di Indonesia, karena pada dasarnya pelabuhan merupakan pintu gerbang bagi pertumbuhan ekonomi daerah sekelilingnya.

Di samping itu luasnya laut dan banyaknya selat, berkembangnya jenis dan teknologi kapal dalam pelaksanaan angkutan laut memerlukan pembangunan di bidang peningkatan keselamatan pelayaran yang titik beratnya pada penyeimbangan sumberdaya manusia dan pelaksanaan berbagai ketentuan Konvensi Internasional, seperti *SOLAS Safety of Life at Sea*, *STCW-95 - Standard Training Certification and Watchkeeping*, *MARPOL-Marine Pollution*, *GMDSS Global Maritime Distress Safety System*, dan *ISM Code - International Safety Management Code*.

Disadari bahwa potensi ke-

lautan yang merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa tersebut belum mendatangkan kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut disebabkan di samping karena konsep kebijaksanaan pengelolaannya sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu, hal yang paling mendasar adalah karena para "pengambil kebijaksanaan" tersebut kurang dilandasi oleh visi dan pemikiran tentang konsep maritim. Mereka dibesarkan di lingkungan keluarga maupun pendidikan yang sangat tipis penanaman kesadarannya tentang kondisi lingkungan yang berupa negara kepulauan. Hal tersebut dapat kita simak bersama pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Depdiknas, bahwa dalam kurikulum SD, SMP maupun SMU tidak ada muatan tentang penanaman kesadaran bahari atau kemaritiman. Dalam hal ini, AT Mahan seorang ahli strategi kekuatan laut mengatakan bahwa seberapa banyak penduduk suatu negara yang memiliki visi dan pandangan tentang konsep maritim itulah yang menentukan warna bangsa tersebut dalam meraih kejayaan di laut.

Dampak Pergeseran Visi Maritim ke Visi Kontinental

Pergeseran visi bangsa Indonesia dari maritim ke kontinental terbukti telah menurunkan eksistensi bangsa, bahkan menimbulkan persoalan-persoalan baru yang semakin rumit dalam lingkup nasional, baik selama masa penjajahan asing, maupun setelah merdeka.

Selama masa penjajahan asing, berbagai perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia gaungnya tidak menyeluruh, melainkan bersifat kedaerahan, sehingga dengan mudah dapat dilokalisir dan dihancurkan melalui blokade laut untuk memutus bantuan perkuatan dari daerah-daerah lain. Di samping itu, politik *divide et impera* yang diterapkan penjajah menjadi cukup efektif untuk memecah belah kekuatan bangsa Indonesia. Pada gilirannya, setiap terjadi perlawanan, pada saat itu pula Belanda semakin kuat, dan kedudukan kita semakin lemah. Akibatnya, kita mengalami penderitaan yang sangat panjang di bawah tekanan bangsa asing.

Setelah merdeka, kultur yang sudah terbangun ratusan tahun adalah kultur masyarakat agraris. Setelah merdeka ± 56 tahun, komitmen nasional untuk lebih memperhatikan wilayah laut, baru terbatas terasa pada wacana semata. Wawasan Nu-

santara yang ditetapkan sebagai landasan visioner dalam pembangunan bangsa, telah ditindaklanjuti dalam operasionalisasinya, antara lain Pemerintah sejak tahun 1993 yang lalu memasukkan pembangunan kelautan ke dalam GBHN. Sejalan dengan itu pada Pemerintahan BJ Habibie, pada bulan September 1998 telah mencanangkan "Deklarasi Bunaken" sebagai himbauan dan ajakan untuk menengok ke laut. Selanjutnya dalam pemerintahan Gus Dur, dan kemudian dalam pemerintahan Megawati, telah membangun dan memberdayakan Departemen Kelautan dan Perikanan, serta Dewan Maritim Indonesia. Walaupun demikian, dalam implementasi dan operasionalnya, aspek kelautan tersebut belum disentuh dengan sungguh-sungguh, padahal daya dukung wilayah daratan sudah semakin terbatas untuk menopang kelangsungan hidup bangsa Indonesia meskipun potensi kelautan nasional sedemikian besar.

Realita yang berkembang menunjukkan bahwa sebagai akibat terjadinya pergeseran visi bangsa, yang pada saat ini berbasis visi kontinental, telah mengakibatkan bangsa Indonesia berada pada situasi yang cukup sulit, sehingga terkesan kurang serius dalam menyikapi potensi konflik laten yang setiap saat dapat me-

nimbulkan ancaman bagi eksistensi bangsa.

Dalam menyelesaikan masalah perbatasan laut dengan negara tetangga, Indonesia terkesan cenderung pasif, sementara negara lain sangat aktif dengan membangun infrastruktur dan menempatkan aparat di daerah sumber konflik, serta berupaya menarik opini dunia untuk mempengaruhi proses hukum yang sedang berlangsung. Contohnya adalah penyelesaian masalah Pulau Sipadan-Ligitan dengan Malaysia.

Dalam menghadapi kemungkinan ancaman dari luar lewat laut dan mengantisipasi berbagai permasalahan aspek laut yang merugikan kepentingan nasional, di mana diperlukan kemampuan dan kekuatan pengendalian laut yang memadai, pemerintah dihadapkan kepada pilihan yang sulit. Dalam hal ini pemerintah lebih memfokuskan perhatiannya pada masalah-masalah di darat, sehingga kemampuan pengendalian laut nasional terbelakangkan.

Di samping itu, terkristalnya orientasi pemikiran kontinental juga mengakibatkan kesulitan dalam pembangunan ekonomi nasional. Kebijakan nasional justru berupaya mengoptimalkan potensi wilayah darat, dengan pembangunan infrastruktur, dan mengeksploitasi

sumberdaya alam di darat secara besar-besaran, sedangkan di sisi lain, daya dukung daratan sudah tidak memungkinkan lagi untuk dikembangkan. Sementara itu, wilayah laut berikut kandungan sumberdaya alamnya yang masih cukup potensial belum tersentuh oleh kebijaksanaan pembangunan yang adil dan berwawasan ke depan, bahkan memberikan peluang kepada pihak-pihak asing untuk memanfaatkannya baik secara legal maupun ilegal. Sebagai gambaran dapat dijelaskan bahwa armada perikanan yang beroperasi di Indonesia sebagian besar adalah milik asing, namun berbendera Indonesia. Persentase terbesar Armada niaga, baik domestik maupun internasional, juga dikelola oleh pihak-pihak asing. Potensi wisata bahari yang sangat menjanjikan masa depan, justru kurang dikelola dengan baik, sehingga perkembangannya sangat lamban. Industri jasa maritim, terkesan tumbuh segan mati tak mau, karena kurang ada stimulus yang prospektif bagi pengembangan industri jasa maritim tersebut. Pengelolaan pertambangan dan energi lepas pantai, sebagian besar dikuasai oleh pihak-pihak asing, karena kita belum memiliki kemampuan teknologi dan modal yang memadai.

Kondisi semacam ini sesung-

gahnya sudah berlangsung cukup lama, namun ironinya kita tak kunjung mampu menguasai teknologi, dan belum memiliki permodalan yang cukup. Demikian pula dalam mengatasi krisis ekonomi nasional yang berkepanjangan dan sangat memprihatinkan dewasa ini, kita belum menyentuh potensi kelautan nasional secara optimal, sehingga potensi ini belum mampu memberikan kontribusi maksimal bagi upaya pemulihan krisis ekonomi tersebut.

Tak kalah pentingnya adalah berbagai seminar tentang kelautan dalam lingkup nasional dan daerah telah dilakukan. Dari seminar-seminar tersebut, banyak pakar khususnya pakar kelautan, baik dari dalam maupun luar negeri berpendapat bahwa potensi kelautan nasional apabila dikelola dengan baik, maka dalam waktu singkat dapat membantu pemerintah untuk keluar dari krisis ekonomi nasional.

Perkembangan Lingkungan

Globalisasi ditandai oleh dominasi negara-negara besar di belahan Utara terhadap politik, ekonomi, budaya dan komunikasi, sains dan teknologi, serta militer. Pada aspek politik, peta politik dunia dikuasai AS yang secara *de facto* juga menentukan

garis-garis politik PBB, sehingga politik dunia "dikendalikan" sesuai dengan kepentingan AS. Pada aspek ekonomi, perekonomian dunia digerakkan oleh negara-negara besar yang tergabung dalam kelompok G-8 yang menguasai $\pm 70\%$ perdagangan dunia, di mana segala aturan main perdagangan internasional yang dikeluarkan oleh *World Trade Organization* (WTO) di bawah kendali negara-negara besar tersebut. Sebagai implikasinya, apabila terjadi perselisihan dagang antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju yang diselesaikan lewat badan WTO, sangat mungkin dapat "diintervensi" sesuai kepentingan politik negara-negara maju tersebut. Pada aspek budaya dan komunikasi, di mana komunikasi termasuk teknologi informasi didominasi oleh negara-negara yang terletak di segitiga besar dunia, yaitu Eropa Barat-Amerika Utara-Asia Timur, sehingga transformasi nilai-nilai dan opini dunia dapat dengan mudah disesuaikan dengan kepentingan mereka. Pada aspek sains dan teknologi, perkembangannya dikuasai oleh negara-negara maju di belahan bumi Utara, sehingga segala produk bermuatan teknologi berikut pemasarannya dapat dikendalikan oleh mereka. Pada aspek militer, negara-negara Ba-

rat, khususnya AS sebagai adidaya tunggal, menguasai teknologi militer, baik konvensional maupun modern, di mana teknologi militer pada umumnya dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan AS. Pada gilirannya, pembangunan kekuatan militer negara-negara berkembang mau tidak mau berada di bawah kendali negara-negara besar, khususnya AS dan sekutu-sekutunya (Prof. D.R. Juwono Sudarsono, 2002). Hal-hal sebagai dikemukakan di atas, kesemuanya berpengaruh besar terhadap dinamika kehidupan nasional.

Berlakunya perdagangan bebas Asia Tenggara (AFTA) mulai tahun 2003 dan Asia Pasifik (APEC) tahun 2010 akan ditandai dengan penurunan tarif serta perdagangan barang dan jasa lintas negara. Kondisi ini, mengakibatkan timbulnya persaingan yang sangat ketat antar-negara dalam memperebutkan akses ekonomi demi kepentingan nasionalnya masing-masing. Untuk itu, Indonesia memerlukan produk-produk barang dan jasa yang memiliki keunggulan komparatif dan daya saing yang kompetitif.

Di sisi yang lain, globalisasi dan perdagangan bebas dapat mengakibatkan masing-masing negara saling membutuhkan satu dengan lainnya (*interdependency*), di mana negara-negara

berkembang termasuk Indonesia mempunyai posisi tawar yang cukup baik apabila mampu mengelola potensi sumberdaya alamnya menjadi produk-produk unggulan.

Perkembangan lingkungan tersebut, seyogyanya menyadarkan kita bahwa kita harus memiliki kemampuan daya saing yang tinggi apabila tidak ingin menjadi pelayan di negara sendiri.

Peluang yang ada pada kita adalah kandungan sumberdaya alam, khususnya sumberdaya kelautan yang masih sangat potensial. Dengan mengelola potensi tersebut secara baik, maka kita akan memiliki *bargaining power* yang tinggi dalam percaturan internasional, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan Ketahanan Nasional dalam menghadapi ketatnya persaingan antar-bangsa. Untuk itu, diperlukan SDM Indonesia yang berkualitas dan memiliki visi maritim.

Alternatif Pemecahan Masalah

Menghadapi berbagai permasalahan tersebut maka salah satu alternatif pemecahan masalahnya adalah dengan mengembangkan Konsep Maritim Indonesia yang diaplikasikan sesuai dinamika yang berkembang. Konsep maritim yang dimaksud adalah pengem-

bangun lanjut dari konsepsi Wawasan Nusantara sebagai konsepsi geopolitik Indonesia, yang mencakup 4 (empat) hal pokok. Pertama, menumbuhkembangkan kembali visi maritim bangsa Indonesia. Kedua, merumuskan kebijaksanaan dan strategi pembangunan nasional, khususnya aspek kelautan yang lebih implementatif dan operasional berdasarkan pendekatan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang. Ketiga, mengedepankan kesatuan *policy* dan desentralisasi kewenangan yang ditopang oleh *law enforcement* yang tegas dalam menyikapi berlakunya otonomi daerah. Keempat, mengendalikan potensi konflik laten dengan diplomasi aktif.

Pertama, menumbuhkembangkan visi maritim bangsa. Dalam konteks ini, kunci utamanya adalah membangun sumberdaya manusia (SDM) dan masyarakat Indonesia yang berwawasan maritim, khususnya para elite nasional, dengan ciri-ciri sadar akan kondisi geografi tanah air Indonesia.

Kesemuanya itu, membutuhkan waktu yang cukup panjang, minimal 5 - 10 tahun, karena yang harus dirombak adalah kultur atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Kultur kita sebagai masyarakat agraris sudah terkristal selama lebih dari dua ratus tahun, yaitu sejak abad ke-

18 dan selama masa penjajahan Belanda. Selama Indonesia merdeka, kultur tersebut tetap dipertahankan bahkan lebih diperdalam pada era pemerintahan Orde Baru. Untuk mempercepat proses perombakan kultur perlu diintensifkan langkah-langkah pembinaan dalam lingkup nasional secara menyeluruh, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, pendidikan nasional dan lingkungan kerja/penugasan, dengan penjuruan dunia pendidikan.

Sebagai contoh dapat kita lihat, kemajuan yang diperoleh negara tetangga Malaysia hari ini, adalah hasil kerja keras penyiapan SDM melalui dunia pendidikan selama lebih kurang 15-20 tahun yang lalu.

Di lingkungan pendidikan nasional, yang perlu segera dikembangkan adalah mendesak pemerintah dalam hal ini Depdiknas untuk memasukkan kurikulum kebaharian sebagai muatan pendidikan dalam lingkup nasional mulai dari SD, SMP, SMU sampai dengan perguruan tinggi, di semua daerah di seluruh pelosok tanah air. Sebagai tahap awal, perlu didorong berdirinya Sekolah-sekolah bercirikan kemaritiman di kota-kota pesisir, baik di wilayah barat maupun di wilayah timur Indonesia. Dalam rangka itu diharapkan agar para kepala daerah

dapat mengambil peranan tersebut.

Sejak merdeka sampai saat ini, kurikulum kebaharian masih belum diterapkan pada pendidikan nasional sebagaimana kita lihat pada kurikulum nasional TK, SD, SLTP, SMU keluaran Badan Penelitian dan Pengembangan (Depdiknas), kecuali pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Hang Tuah TNI AL yang sudah menerapkannya sejak tahun 1985-an. Sehubungan dengan itu, sekolah-sekolah dapat memprogramkan waktu-waktu liburannya dengan kegiatan ekstra kurikuler berupa pelatihan layar, selam atau pelestarian lingkungan laut bekerja sama dengan TNI-AL, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) atau pihak-pihak lain. Kegiatan tersebut dapat dikemas dalam "Program Bintal Juang Remaja Bahari" atau "Program Pemuda Cinta Bahari" guna mensukseskan kampanye dan program Departemen Kelautan dan Perikanan yaitu "Lautmu, Lautku, Satu".

Di lingkungan keluarga, yang perlu ditumbuhkembangkan adalah pemahaman kepada anak-anak sejak usia dini akan kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan sejarah-sejarah kejayaan bangsa sebagai bangsa maritim, serta kecintaan terhadap tanah air Indonesia mela-

lui bahan-bahan bacaan, ceritera-ceritera, tempat bermain yang bernuansa kelautan. Dalam hal ini peranan para orang tua sangat diharapkan dalam membangun kesadaran tersebut.

Di lingkungan masyarakat, yang perlu ditumbuhkembangkan adalah kebiasaan-kebiasaan/kultur masyarakat yang berorientasi maritim, baik secara individu maupun kelompok masyarakat, mulai dari masyarakat pedesaan sampai masyarakat perkotaan. Mengingat sifat masyarakat kita yang masih bersifat paternal, maka peran pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat diharapkan. Pada tahun 1977 beberapa pondok pesantren bahari (Ponpes Bahari) telah diresmikan oleh Menteri Agama Dr. Tarmizi Taher bekerja sama dengan TNI AL di beberapa tempat yakni di Kabupaten Rembang (Ponpes Nahjatus Solikhin/ Kragan); di Padang Pariaman/Sumbar (Ponpes Tapuz Marunggi), di Kotawaringin/Kalteng (Ponpes Assyuru Yama), di Kabupaten Muna/Sultra (Ponpes Khairu Ummah) dan di Pangkajene/Sulsel (Ponpes Kelautan Pulau Perak). Walaupun demikian hasilnya masih terlalu amat sedikit dibandingkan cita-cita yang ingin kita raih.

Di lingkungan kerja/tugas, khususnya di lembaga legislatif,

eksekutif dan yudikatif, yang perlu dikembangkan adalah pedoman-pedoman dasar berupa peraturan perundang-undangan dan hukum yang bernuansa visi maritim sebagai penopang pelaksanaan pembangunan nasional.

Kedua, merumuskan kebijaksanaan dan strategi pembangunan nasional khususnya aspek kelautan, yang lebih implementatif dan operasional, dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang.

Dalam konteks ini, Wawasan Nusantara sebagai konsepsi geopolitik Indonesia, seyogyanya menjiwai berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan keputusan nasional, baik aspek politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.

Pada aspek politik dan ekonomi yang perlu dikembangkan adalah adanya kehendak (*political will*) untuk memacu pembangunan nasional aspek kelautan. Dalam konteks ini, *political will* perlu diarahkan untuk menciptakan iklim politik yang kondusif dan adanya kepastian hukum yang jelas dalam pemanfaatan potensi kelautan nasional.

Dalam hal pemanfaatan berbagai potensi kekayaan alam di laut, seyogyanya tetap mengacu kepada amanat UUD 1945 khususnya pasal 33. Artinya,

masyarakat dan rakyat memperoleh hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta menikmati hasil-hasil kelautan, kecuali dalam hal penggunaan teknologi modern yang belum dikuasai. Peraturan dan mekanisme pengaturan dalam hal proses pemanfaatan hendaknya diatur seringkasan mungkin namun obyektif, sehingga tujuan pemanfaatan untuk peningkatan dapat tercapai.

Pada aspek sosial budaya, yang perlu dikembangkan adalah menumbuhkan kembali kultur masyarakat Indonesia sebagai masyarakat maritim. Agar masyarakat kita mau dan mampu melihat serta menyadari realitasnya sebagai masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang sebagian besar terdiri dari laut. Setelah masyarakat sadar, kemudian didorong untuk memanfaatkan laut berikut potensi sumberdaya alamnya dengan sebaik-baiknya.

Pada aspek pertahanan dan keamanan, yang perlu dikembangkan adalah komitmen untuk terlaksananya pengamanan terhadap potensi sumber kekayaan di laut sekaligus mengantisipasi potensi konflik yang berkembang ke arah yang merugikan. Berlandaskan teori "pengamanan sektor" karena sangat tidak mungkin melaksanakan "pengamanan me-

lingkar", maka kebutuhan kapal patroli sebagai unit pengamanan di laut dapat dibedakan atas kebutuhan ideal yang membutuhkan tidak kurang dari 600 - 700 kapal, kebutuhan standard berkisar 400 kapal dan kebutuhan minimal 200 kapal. Jumlah kapal patroli kita dewasa ini masih jauh dari kebutuhan. Untuk itu ada dua hal yang dapat dilaksanakan, yaitu: (1) mendorong peran masyarakat desa pantai, nelayan dan pelaksana eksplorasi sumber daya kelautan untuk ikut serta menciptakan pengamanan dan perlindungan terhadap potensi kekayaan alam yang kita miliki. Sehubungan dengan itu maka peranan Departemen Kelautan dan Perikanan serta TNI AL dengan konsep Pembinaan Potensi Maritimnya diharapkan dapat mewujudkan komplemen tersebut; (2) mengupayakan upaya terobosan untuk meningkatkan jumlah kapal patroli tanpa membebani APBN, antara lain dengan melakukan barter dengan pengusaha perikanan asing atas ijin penangkapan ikan di laut tertentu, yaitu pada daerah yang pasti oleh sejumlah kapal ikan mereka dalam waktu tertentu dengan sejumlah kapal patroli.

Kebijakan dan strategi tersebut, seyogyanya dimotori oleh suprastruktur nasional, khususnya dalam hal penyiapan

aturan perundang-undangan yang berlaku, dan produk-produk keputusan-keputusan nasional.

Ketiga, mengedepankan kesatuan policy dan desentralisasi kewenangan yang ditopang oleh *law enforcement* yang tegas dalam menyikapi berlakunya otonomi daerah.

Dalam hal ini pengaturan pemanfaatan potensi kekayaan alam di laut diatur dengan kebijaksanaan umum secara terpusat yang memperhatikan dampak lingkungan, nilai kelestarian dan kesinambungan, serta dampak satu dengan lainnya. Adapun pemanfaatan yang sebesar-besarnya diarahkan untuk kemakmuran rakyat, dapat diwenangkan kepada pemerintah daerah, sedangkan pengawasannya dilaksanakan bersama oleh rakyat dan aparat penegak hukum, yang diharapkan adalah penegakan hukum secara tegas. Oleh karena itu maka yang merupakan kebutuhan sangat mendesak adalah ditetapkannya Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) wilayah laut sebagai implementasi pengaturan pengelolaan wilayah laut. Hal itu harus merupakan kebijaksanaan umum pemerintah. Dalam hal pemanfaatan laut, yang perlu digarisbawahi adalah membuang jauh-jauh pemikiran dan keinginan untuk membagi-bagi laut seperti

pelaksanaan pengkaplingan tanah di darat. Laut tidak dapat dan tidak mampu dibagi-bagi. Laut itu pada dasarnya adalah satu. "*From the Arctic to the Antarctic and from the Pacific to the Indian Ocean, the sea is one. Because the sea poses a common challenge, those who traversed it depended on each other, helped each other and developed a special bond*".

Sejak berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah pada 1 Januari 2001 sampai saat ini ternyata telah memunculkan timbulnya konflik-konflik kepentingan, baik antar-kabupaten dan antara kabupaten dengan propinsi, maupun antara daerah dengan pusat. Pemahaman para pejabat daerah yang kurang mantap tentang otonomi daerah mengakibatkan lahirnya peraturan-peraturan daerah yang tidak jarang justru bertentangan dengan peraturan-peraturan nasional, pengkaplingan wilayah laut dan kesenjangan antara daerah-daerah potensial dengan daerah-daerah minus. Ketidaksiapan supra-struktur daerah telah menimbulkan peluang KKN di daerah, yang pada gilirannya semakin menghambat pelaksanaan pembangunan.

Kesemuanya tersebut, justru menyimpang dari tujuan awal pemberlakuan otonomi daerah, yaitu memperkuat persatuan

dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI melalui pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran di seluruh daerah.

Menghadapi situasi tersebut maka perlu diterapkan kesatuan politik nasional dan desentralisasi kewenangan yang ditopang oleh *law enforcement* yang tegas. Kesatuan politik nasional, pada satu sisi dimaksudkan untuk mempertegas kembali bahwa pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya diarahkan dalam kerangka persatuan bangsa dan kesatuan wilayah, namun pada sisi yang lain peraturan perundang-undangan dan keputusan yang berlingkup nasional agar dijadikan pedoman dasar oleh tiap-tiap daerah otonom. Desentralisasi kewenangan pada prinsipnya diarahkan untuk memberikan peluang kepada daerah dalam menciptakan stimulus dan kemudahan-kemudahan dalam usaha agar mendorong peran swasta untuk lebih mampu berperan secara aktif dalam pembangunan ekonomi, serta mendorong kerjasama antar-daerah otonom. *Law Enforcement* yang tegas diarahkan untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi segala kegiatan masyarakat.

Keempat, mengendalikan potensi konflik laten dengan diplomasi. Penetapan Hukum Laut Internasional 1982 sebagai hu-

kum positif memerlukan adanya penyelesaian batas wilayah perairan, landas kontinen dan ZEE antar-negara Asean yang bertetangga. Indonesia memiliki wilayah perbatasan laut dengan negara-negara tetangga, yaitu perairan Sulawesi Utara berbatasan langsung dengan Filipina, perairan Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan Malaysia, sedangkan perairan Natuna berbatasan langsung dengan Vietnam dan Malaysia.

Klaim perbatasan merupakan salah satu sumber konflik potensial. Hal ini pada dasarnya disebabkan oleh warisan sejarah kolonial yang tidak tuntas, di mana para penjajah pada masa lalu tidak jelas dalam menetapkan batas-batas wilayah. Banyak peta yang dikeluarkan saling berbeda, sehingga batas-batas wilayah yang digambarkan pada waktu penjajahan tidak diterima oleh negara-negara yang telah merdeka (negara-negara tersebut cenderung menerima apabila dianggap menguntungkan). Selain itu, tidak jelasnya perjanjian, pengaturan, dan penyerahan suatu wilayah, baik antar-penjajah maupun antara penjajah dengan negara pengantinya, semakin merumitkan masalah sengketa teritorial tersebut. Di samping klaim perbatasan dengan negara tetang-

ga, yang tidak kalah memerlukan perhatian kita adalah perbatasan antar-daerah (kabupaten/provinsi) serta klaim terhadap pulau-pulau tertentu.

Dalam konteks ini, terdapat dua langkah strategis yang perlu ditempuh, yaitu (1) menetapkan titik-titik batas wilayah nasional melalui Peraturan Perundang-undangan sebagai jabaran lanjut dari UNCLOS 1982. Dalam hubungan ini dapat ditegaskan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang hal ini sudah cukup lama selesai dirumuskan. Kondisi stagnan, yaitu menunggu penyelesaian kasus Sipadan Ligitan atau Timor Gap yang membutuhkan waktu cukup lama seyogyanya ditinggalkan untuk sementara dan kelak ditetapkan dengan peraturan pemerintah tersendiri, (2) memprioritaskan dan memacu dilaksanakannya perjanjian perbatasan dengan negara tetangga secara sinergi antara instansi terkait dalam program kegiatan masing-masing, sehingga dalam dasawarsa ke depan masalah ini memperoleh penyelesaian. Kiranya instansi-instansi seperti Deplu, Dephan, DKP, Bakorsurtanal dan instansi/lembaga lainnya dapat memacu harapan tersebut.

Agar kebijaksanaan tersebut dapat terlaksana maka dibutuhkan langkah-langkah pemasya-

rakatan dan sosialisasi untuk memperoleh pengertian, pemahaman dan penghayatan dari masyarakat luas akan arti yang ingin dicapai, di samping mengaktifkan kerjasama dengan badan-badan internasional/regional oleh masing-masing instansi guna menumbuhkan saling pengertian.

Penutup

Tidaklah dapat dipungkiri bahwasanya dewasa ini bangsa kita cenderung ahistoris atau kurang begitu mendalami sejarahnya, sehingga kejayaan masa lalu sebagai bangsa bahari menjadi terlupakan dan tidak dimanfaatkan sebagai sumber motivasi untuk *survive* dalam menghadapi dinamika tantangan perkembangan jaman.

Adalah suatu hal yang sangat ironis, bangsa Indonesia yang hidup di negara kepulauan dengan dua pertiga wilayahnya terdiri dari laut dengan sumberdaya alamnya yang sangat potensial, sejak merdeka sampai saat ini "hanya" menggantungkan masa depannya dari potensi wilayah daratan.

Wawasan Nusantara sebagai konsepsi geopolitik Indonesia ternyata dalam implementasi dan operasionalnya belum menyentuh nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan kata

lain, landasan visioner yang dijiwai oleh nuansa maritim hanya sekedar sebagai wacana, di mana aspek kelautan belum disentuh dengan sungguh-sungguh, padahal daya dukung wilayah daratan sudah semakin terbatas untuk menopang kelangsungan hidup bangsa Indonesia meskipun di sisi lain potensi kelautan nasional sedemikian besar.

Pemikiran-pemikiran kontinental ternyata masih melekat pada sebagian besar para penentu kebijaksanaan nasional, sehingga membawa dampak bukan saja eksistensi bangsa Indonesia terancam setiap saat karena adanya potensi konflik laten, seperti masalah perbatasan laut yang belum tuntas; posisi geographic Indonesia yang terbuka sangat memungkinkan bagi datangnya ancaman dari berbagai arah; Indonesia menjadi target utama perluasan *strategic space* negara-negara besar yang memiliki kepentingan vital di Asia Tenggara. Lebih dari itu, berbagai problema pembangunan nasional belum terselesaikan dengan baik, terutama di saat mengalami krisis multidimensional yang berkepanjangan dewasa ini.

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan nasional tersebut, sudah saatnya kita pacu kebijaksanaan pengembangan

konsepsi maritim dalam bingkai geopolitik Indonesia, sebagai penjabaran tindak lanjut konsepsi Wawasan Nusantara dalam implementasi dan operasionalnya. Dalam konteks ini, terdapat dua langkah yang perlu dipikirkan, yaitu: (1) menumbuhkan kembali visi maritim bangsa Indonesia, yang intinya adalah memupuk kesadaran bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan hidupnya yang sebagian besar merupakan wilayah laut. Artinya, menumbuhkan keinginan untuk mau melihat, menyadari, memahami, kemudian memanfaatkan laut beserta potensi alamnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat banyak. Dalam hubungan ini, sasarannya adalah berubahnya kultur manusia dan masyarakat Indonesia, khususnya para penentu kebijaksanaan nasional (supra struktur nasional), dari kultur yang berorientasi kontinental menjadi kultur maritim, (2) modifikasi kebijaksanaan dan strategi pembangunan nasional khususnya aspek kelautan, di mana Wawasan Nusantara sebagai konsepsi geopolitik Indonesia menjiwai berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan keputusan nasional pada segenap aspek.

Kita bersama tentunya berharap agar hal-hal tersebut dapat terwujud, karena ia menjan-

jikan kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Harapan kita pula pada millennium ini bangsa Indonesia akan kembali jaya sebagai bangsa bahari. Pengalaman mengajarkan kepada kita: "Sejarah akan berulang". Semoga!

Daftar Pustaka

- TNI Angkatan Laut Menuju Hari Esok Yang Lebih Baik*, Juni 1998.
- Bahan Raker Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Komisi III DPR*, 25 Februari 2002.
- George Kent dan Mark J. Valencia, *Marine Policy in Southeast Asia*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, 1985.
- Dr. Rizal Sukma, *Sea Powers and Maritime Security in The 21st Century*.
- M. Dawam Rahardjo, *Tantangan Indonesia sebagai Bangsa*, Esai-esai Kritis tentang Ekonomi, Sosial, dan Politik, UII Press, Yogyakarta, 1999.
- Prof. Dr. Moeljarto Tjokrowinto, MPA, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- Didin S. Damanhuri, *Pilar-pilar Reformasi Ekonomi-Politik Upaya Memahami Krisis*

Ekonomi dan Menyongsong Indonesia Baru, Cides Pustaka Hidayah, Jakarta, 1999.

Ginanjart Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Cides, Jakarta, 1996.

Universitas Hang Tuah, *Neptunus: Majalah Ilmiah Pembangunan dan Pengembangan Kelautan*, Edisi 6 dan 7, UHT, Surabaya, 1997.

Dr. Ir. Rokhim Dahuri, *Kebijakan dan Program Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Menuju Bangsa Indonesia yang Maju, Makmur dan Berkeadilan*, Departemen Kelautan dan Perikanan RI, Jakarta, 2001.

Pokja TNI AL, *Konsep Kebijakan Maritim Indonesia*, Mabes TNI AL, Jakarta, 2001.

